

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Razak. 2021. *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Litera. Yogyakarta.

Adek Media (Tempo), dkk. 2013. *Seri Buku Tempo KPK Tak Lekang*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Majalah Tempo. Jakarta.

Amirudin & H. Zainal A. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Angga Martandy Prihantoro. 2010. *Eksistensi State Auxiliary Organs Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta

Denny Indrayana. 2016. *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara, Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Intrans Publishing. Malang.

Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Faisal Abdullah. 2012. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta.

Firmansya, dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Jakarta.

Indah Harlina. 2008. *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum*. Disertasi. Universitas Indonesia

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Rhenald Khasali, dkk. 2016. *Memperkuat dan Mempertahankan KPK*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.

Sri Hartini, dkk. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Yudi Suparyanto. 2010. *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*. Saka Mitra Kompetensi. Klaten.

Jurnal:

Achmad Bajuri. *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol.18. No. 1. 2011.

Anggiat PS & Ramsul N. *Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal*. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik. Vol. 3. No. 2. 2021.

Ariesta HP & Supriyadi. *Kepribadian Pegawai Negeri Sipil yang Berintegritas Berdasarkan Teori Eysenck*. Jurnal Psikologi Udayana. ISSN: 2354 5607. 2016.

Asrizal & Sobirin Malian. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen*. Ahmad Dahlan Legal Perspective. Vol. 1. No. 2. 2021.

- Ayu P dan NurRochaeti. *The Impact Of Enforcement Of Corruption Law by The Corruption Eradication Commission After The Ratification Of The Latest KPK Law*. Jurnal Penelitian Hukum de Jure. Vol. 21. No. 3. 2021.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Pembeantasan Korupsi*. Jurnal Keadilan. Vol. 5. No. 1. 2011.
- Cynthia Dewi K. dan Ismunarno. *Perbandingan Tugas dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) dalam Pemberantasan Korupsi*. Recidive. Vol. 4. No. 3. 2015.
- Dinda Dechyntia A. *Konstitusionalitas Kemandirian Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Bank Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Alethea. Vol. 3. No. 1. 2019.
- Efi Yulistiyowati. *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18. No. 2. 2016
- Endang Komara. *Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia*. Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan. Vol. 4. No. 1. 2019.
- Henry H., dkk. *Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Sains. Vol. 1. No. 8. 2021.
- Hibnu Nugroho. *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13. No. 3. 2013.
- Kurnia Ramadhana. *Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS. Vol. 5. No. 2. 2019.

- Mellysa FW. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara*. Jurnal Hukum Legal Standing. Vol. 2. No. 1. 2018.
- Nafiatul Munawaroh. *Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi di Asia Pasifik*. Lex Renaissance. Vol. 6. No. 3. 2021.
- Nehru Asyikin dan Adam Setiawan. *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK*. Justitia Jurnal Hukum. Vol. 4. No. 1. 2020.
- Noldy Mohede. *Tugas dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol. XX. No. 1. 2012.
- Rahardian & Budi. *Hubungan antara Tingkat Integritas Moral dengan Kecenderungan Korupsi Pada Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Instansi Pelayanan Publik (Studi Kasus di Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi. 1. 2012
- Riris Katharina. *Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara*. Pusat Penelitian DPR RI Spirit Publik. Vol. 13. No. 2. 2018.
- Ruhenda, dkk. *Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia*. Journal Of Governance and Social Policy. Vol. 1. No. 2. 2020.
- Rizki Ramadani. *Lembaga Negara Independen di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 27. No. 1. 2020
- Wawan HS, Alvin N. *Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Antikorupsi Integritas. Vol. 5. No. 2. 2019.
- Yasmirah MS, dkk. *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 05. No. 01. 2018.

Yopa Puspitasari. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 4. No. 2. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan KPK No. 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 36/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 70/PUU-XVII/2019

TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Internet:

Adam Setiawan. 2019. *KPK Di Ambang Kehancuran*. Kaltim Prokal. ([KPK di Ambang Kehancuran | Kaltim Post \(prokal.co\)](#))

Jimly Asshiddiqie. *Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*. 2008. 091. Hubungan antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945 (25 Maret 2008).pdf ([bappenas.go.id](#))

Komisi Aparatur Sipil Negara. 2020. [Pembahasan Perkom Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN Melibatkan KASN, Kemenpan, BKN dan LAN \(kasn.go.id\)](#).

MKRI. [KPK Perlu Segera Masuk dalam Konstitusi \(KPK Perlu Segera Masuk dalam Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)\)](#)

Nurmalita Ayuningtyas H. *Pegawai KPK*. 2019. [Pegawai KPK - Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia \(uii.ac.id\)](#).

Tim pengkajian di bawah pimpinan Dr. Mudzakkir, SH., MH. 2011. *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hal. 35 [kpd-2011-7.pdf](#) ([bphn.go.id](#))

UNCAC Coalition. *UNCAC Coalition Statement on threats to the independence of Indonesia's Corruption Eradication Commission KPK*. ([Indonesia-statement-on-KPK—27092019.pdf](#) ([uncaccoalition.org](#))).

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 ([LAPORAN KINERJA MK pegawai asn.pdf](#))

Zainal Arifin Mochtar. Berlabel ASN, Masihkah KPK Independen?. <https://youtu.be/dbqY56R58EA>.